

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan agraria di Indonesia merupakan salah satu masalah struktural yang memiliki akar historis panjang sejak masa kolonial. Sistem agraria pada masa Hindia Belanda ditandai oleh ketimpangan dalam penguasaan tanah, di mana negara kolonial dan pemilik modal menguasai sebagian besar lahan produktif, sementara masyarakat pribumi, khususnya petani, hanya memiliki akses terbatas terhadap sumber daya agraria. Kondisi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakadilan ekonomi, tetapi juga membentuk relasi sosial yang timpang serta memicu konflik agraria yang berkelanjutan hingga setelah kemerdekaan. Dalam perspektif agraria, ketimpangan ini menjadi persoalan mendasar yang menuntut perubahan struktural melalui upaya reforma agraria. Struktur agraria yang timpang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal maupun nasional.¹

Ketimpangan tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan agraria tidak berdiri sendiri sebagai masalah ekonomi, melainkan berkaitan erat dengan struktur kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Penguasaan tanah menjadi instrumen penting dalam mempertahankan dominasi, baik oleh negara maupun kelompok elite. Dalam konteks ini, relasi antara petani dan negara tidak pernah bersifat netral, melainkan diwarnai oleh ketegangan kepentingan yang terus berlangsung. Dinamika agraria mencerminkan konflik antara kepentingan petani sebagai kelompok subordinat dengan kepentingan negara serta elite sebagai

¹ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir*, (Bogor: Sajogyo Institute, 2000), hlm.73-74.

pemegang kekuasaan, sehingga persoalan agraria perlu dipahami sebagai arena pertarungan sosial-politik yang kompleks.²

Dalam perkembangan selanjutnya, reforma agraria berkaitan erat dengan proyek nasionalisme Indonesia. Setelah kemerdekaan, negara berupaya menghapus warisan sistem agraria kolonial yang tidak adil dan menggantinya dengan sistem yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Reforma agraria menjadi bagian dari upaya negara pascakolonial untuk menegaskan kedaulatan atas sumber daya agraria sekaligus membangun identitas nasional yang berkeadilan. Upaya ini tidak hanya bertujuan memperbaiki distribusi tanah, tetapi juga mencerminkan kehendak politik untuk membangun tatanan sosial yang lebih setara. Dengan demikian, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan hukum, tetapi juga mengandung dimensi ideologis yang berhubungan dengan cita-cita kemerdekaan dan pembentukan negara bangsa.³

Upaya pembaruan agraria tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika perkembangan hukum agraria yang kompleks. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, sistem hukum agraria di Indonesia ditandai oleh dualisme antara hukum kolonial dan hukum adat. Dualisme ini menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus memperkuat ketimpangan dalam penguasaan tanah. Sistem hukum agraria pada masa tersebut cenderung berpihak pada kepentingan kolonial dan belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menjadi langkah strategis dalam membangun sistem hukum agraria nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemerataan penguasaan tanah.⁴

² Noer Fauzi, *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, (Yogyakarta: INSISTPress, 1999), hlm.39.

³ Retor AW Kaligis, "Agrarian Reform As a Nationalism Issue From Colonial To Reformasi Era", *Paramita: Historical Studies Journal* 29, no. 1 (2019), hlm.29.

⁴ M A Rafie and W C Happier, "Sejarah Perkembangan Hukum Agraria Di Indonesia Sebelum Dibentuknya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ...", *Journal Sains ...* 2, no. 5 (2024): hlm.342, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/2677%0Ahttps://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/download/2677/2442>.

Pada periode tersebut, pelaksanaan reforma agraria berada dalam situasi politik yang semakin kompleks. Perbedaan kepentingan antara berbagai kekuatan politik nasionalis, Islam, dan komunis mempengaruhi cara reforma agraria dipahami dan dijalankan. Dalam kondisi ini, agraria berkembang menjadi isu politik yang diperdebatkan secara luas, baik di tingkat negara maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Konflik agraria yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi reforma agraria tidak terlepas dari tarik-menarik kepentingan antaraktor sosial dan politik, serta sering kali berujung pada ketegangan bahkan kekerasan.⁵

Dalam dinamika tersebut, organisasi petani memegang peran penting dalam memperjuangkan kepentingan agraria. Barisan Tani Indonesia muncul sebagai salah satu organisasi yang aktif mengorganisasi petani serta mendorong perubahan struktur agraria sejak masa revolusi hingga periode Demokrasi Terpimpin. Melalui berbagai kegiatan politik dan sosial, organisasi ini tidak hanya memperjuangkan redistribusi tanah, tetapi juga membangun kesadaran politik di kalangan petani. Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak sekadar menjadi objek kebijakan negara, melainkan juga subjek aktif yang terlibat dalam proses perubahan sosial.⁶

Peran aktif organisasi petani tersebut tidak hanya diwujudkan melalui aksi-aksi politik dan sosial, tetapi juga melalui penyebaran gagasan kepada masyarakat. Dalam konteks inilah media massa menjadi salah satu instrumen penting untuk menyampaikan pandangan organisasi mengenai persoalan agraria. Surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan opini publik terhadap kebijakan agraria yang sedang berkembang. Oleh karena itu, mengkaji surat kabar menjadi penting untuk memahami bagaimana organisasi petani membangun narasi perjuangan agraria di ruang publik.

⁵ Fauzi, *op.cit.*, hlm.141.

⁶ Willy Alfarius, "Barisan Tani Indonesia (BTI) Pada Masa Revolusi Indonesia , 1945-1950" 19, no. 1 (2023): hlm.87.

Seiring dengan berkembangnya dinamika tersebut, media massa menjadi arena penting dalam penyebaran dan pembentukan wacana mengenai reforma agraria. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki kekuatan dalam membentuk persepsi publik. Melalui bahasa, pilihan isu, dan cara penyajian berita, pers berperan dalam membingkai realitas sosial serta menentukan bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, pemberitaan mengenai reforma agraria dalam surat kabar tidak dapat dianggap netral, melainkan merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan dan ideologi tertentu. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap pemberitaan surat kabar menjadi penting untuk melihat bagaimana isu reforma agraria direpresentasikan dan dikonstruksikan dalam ruang publik. Hal ini kemudian mengarahkan perhatian pada surat kabar yang secara khusus memiliki perhatian terhadap persoalan agraria dan kepentingan kaum tani.⁷

Dalam kerangka tersebut, kebebasan pers menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana suatu isu direpresentasikan. Pers yang bera Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi dalam tekanan politik atau memiliki kedekatan dengan kekuatan tertentu cenderung menyajikan realitas sesuai dengan kepentingan yang melatarbelakanginya. Sebaliknya, pers yang memiliki ruang kebebasan lebih luas berpotensi menghadirkan wacana yang lebih beragam. Pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat perjuangan ideologis yang dapat memperkuat atau justru menantang struktur kekuasaan yang ada.⁸

Dalam konteks tersebut, Surat Kabar Suara Tani menjadi media yang menarik untuk dikaji. Sebagai organ resmi Barisan Tani Indonesia (BTI), Suara Tani memiliki karakter pemberitaan yang berbeda dibandingkan surat kabar umum karena secara khusus memberikan perhatian terhadap persoalan agraria dan kehidupan petani. Kedudukannya yang dekat dengan BTI menunjukkan bahwa

⁷ Andi Sebastian et al., "The Development of Indonesian Press Freedom in the Period of Old Order (1950-1965)", *Kalijaga Journal of Communication* 7, no. 1 (2025): hlm.6, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/index>.

⁸ Andi Suwarta, "Dinamika Kehidupan Pers Di Indonesia Pada Tahun 1950 – 1965 : Antara Kebebasan Dan Tanggung Jawab Nasional", *Sosiohumanika* 1, no. 2 (2008): hlm.263.

pemberitaannya tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan kepentingan organisasi dalam memandang reforma agraria. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Suara Tani membingkai isu reforma agraria serta bagaimana orientasi ideologisnya tercermin dalam pemberitaan yang disajikan.

Pemilihan periode 1956-1963 didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu ini merupakan fase penting dalam dinamika reforma agraria di Indonesia. Periode ini mencakup masa menjelang pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria 1960, proses pengesahan, hingga tahap awal implementasinya. Dalam kurun waktu tersebut, perdebatan mengenai agraria berlangsung secara intens, baik di tingkat kebijakan maupun dalam ruang publik, sehingga memungkinkan untuk melihat bagaimana wacana reforma agraria dibentuk dan dipertentangkan.

Dengan menempatkan surat kabar sebagai subjek analisis, penelitian ini memandang pers bukan hanya sebagai sumber sejarah, tetapi juga sebagai aktor yang berperan dalam pembentukan wacana. Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk memahami reforma agraria tidak hanya sebagai kebijakan negara, tetapi juga sebagai proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Interaksi antara negara, organisasi petani, dan media massa menjadi kunci dalam memahami bagaimana isu agraria dikonstruksikan dalam ruang publik.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan bagaimana reforma agraria diberitakan oleh Suara Tani, tetapi juga memahami surat kabar sebagai aktor yang turut membentuk wacana agraria pada akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara media, organisasi petani, dan dinamika reforma agraria di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah disusun di atas, maka sangat penting untuk menyusun rumusan masalah dengan tujuan agar terfokusnya penelitian.

Adapun rumusan masalah yang menjadi acuan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Reforma Agraria hingga lahirnya UUPA Tahun 1960?
2. Bagaimana pemberitaan Reforma Agraria Tahun 1960 dalam surat kabar Suara Tani pada periode 1956-1963?

C. Tujuan Penelitian

Setelah terumusnya masalah, ada tujuan yang dicapai pada penelitian ini. Dimana untuk memahami keterangan serta analisis yang baik dalam menjabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kebijakan Reforma Agraria yang dirumuskan Pemerintah Indonesia hingga ditetapkan UUPA Tahun 1960.
2. Untuk mengetahui surat kabar Suara Tani memberitakan, menarasikan, serta mengonstruksikan isu Reforma Agraria Tahun 1960 pada periode 1956-1963.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap sejumlah literatur yang relevan dengan tema reforma agraria dan dinamika pemberitaan media pada periode 1956-1965. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan sejarah agraria serta perkembangan pers Indonesia, sekaligus menunjukkan posisi orisinal penelitian dibandingkan kajian-kajian terdahulu.

Pertama, buku karya Gunawan Wiradi berjudul *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir* (2000) menggunakan pendekatan historis-sosiologis dengan metode kualitatif melalui studi literatur dan analisis struktural. Karya ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan akar ketimpangan penguasaan tanah sebagai warisan kolonial serta menegaskan urgensi reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan sosial. Kelebihan utama penelitian ini terletak pada kedalaman analisisnya terhadap struktur sosial-ekonomi pedesaan dalam perspektif makro. Namun, keterbatasannya adalah belum menempatkan media massa sebagai arena produksi wacana, sehingga tidak menjelaskan

bagaimana isu reforma agraria dikonstruksi dalam ruang publik. Dengan demikian, pembeda utama penelitian ini dengan karya Wiradi terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini tidak hanya melihat reforma agraria sebagai kebijakan struktural, tetapi juga sebagai wacana yang diproduksi dan disebarakan melalui media, khususnya surat kabar Suara Tani periode 1956-1963.⁹

Kedua, buku karya M. Nazir Salim berjudul *Reforma Agraria: Buku Ajar STPN* (2020) menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode deskriptif analitis terhadap regulasi dan kebijakan agraria. Buku ini menjelaskan secara sistematis dasar filosofis, landasan hukum, serta tujuan reforma agraria sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Kelebihan karya ini terletak pada kejelasannya dalam memetakan kerangka hukum dan kelembagaan reforma agraria di Indonesia. Namun, keterbatasannya adalah pendekatannya yang cenderung normatif, sehingga kurang menggambarkan dinamika sosial-politik serta pertarungan ideologis di balik implementasi reforma agraria. Berbeda dengan penelitian Salim, penelitian ini justru menempatkan reforma agraria sebagai isu politik dan ideologis yang dikonstruksi melalui media massa. Pembeda utamanya terletak pada penggunaan analisis framing untuk melihat bagaimana surat kabar Suara Tani membingkai reforma agraria, bukan sekadar sebagai kebijakan hukum, melainkan sebagai alat perjuangan politik.¹⁰

Ketiga, penelitian Mohamad Shohibuddin dan Ahmad Nashih Luthfi berjudul *Land Reform ala Ngandagan: Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964* (2010) menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan metode studi kasus. Penelitian ini mengkaji praktik pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal dengan menyoroti hubungan antara kebijakan negara dan sistem sosial desa. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya menunjukkan bahwa pelaksanaan land reform bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, serta kekuatan politik lokal. Namun, keterbatasannya adalah fokusnya yang terbatas pada praktik di tingkat desa, sehingga belum membahas

⁹ Wiradi, *log.cit.*, hlm. 142.

¹⁰ M. Nazir Salim, *Reforma Agraria Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, (Yogyakarta: STPN Press, 2020).

bagaimana reforma agraria direpresentasikan dalam diskursus publik yang lebih luas. Oleh karena itu, pembeda penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari praktik lokal ke ranah wacana, dengan menempatkan media cetak sebagai objek kajian utama dalam memahami konstruksi makna reforma agraria.¹¹

Keempat, artikel jurnal karya Eka Yudha Wibowo berjudul “Pertarungan Ideologi Petani: Studi Historis Konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia dan Barisan Tani Indonesia (1945-1960)” (2019) menggunakan pendekatan sejarah politik dengan metode penelitian historis berbasis studi arsip dan literatur sekunder. Artikel ini membahas konflik ideologis antarorganisasi petani dalam memperebutkan pengaruh politik di pedesaan. Kelebihan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengungkap dimensi ideologis gerakan tani serta relasinya dengan dinamika politik nasional. Namun, keterbatasannya adalah belum mengkaji peran media massa dalam merepresentasikan dan menyebarluaskan konflik tersebut kepada publik. Berbeda dengan penelitian Wibowo, penelitian ini tidak hanya melihat konflik ideologis sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai wacana yang diproduksi dan dibingkai dalam media, khususnya dalam surat kabar Suara Tani yang memiliki kedekatan dengan Barisan Tani Indonesia.¹²

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek kebijakan agraria, kerangka hukum, praktik lokal, serta konflik ideologis organisasi tani. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut belum menempatkan media massa sebagai ruang produksi makna yang aktif dalam membentuk pemahaman publik mengenai reforma agraria. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum terisi, yakni kajian mengenai bagaimana reforma agraria dikonstruksi, direpresentasikan, dan dibingkai dalam media massa pada periode 1950-an sampai 1960-an.

¹¹ Mohamad Shohibuddin and Ahmad Nashih Luthfi, *Land Reform Lokal Ala Ngandagan*, (Yogyakarta: STPN Press, 2010).

¹² Eka Yudha Wibowo, “Pertarungan Ideologi Petani : Studi Historis Konflik Antara Sarekat Tani Islam Indonesia Dan Barisan Tani Indonesia 1945-1960”, 2025, hlm.59–72, <https://doi.org/10.22515/isnad.v6i01.11674>.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang terletak pada integrasi antara kajian sejarah agraria dan sejarah pers dengan menggunakan analisis framing. Secara khusus, penelitian ini menyoroti bagaimana surat kabar Suara Tani periode 1956-1963 membingkai reforma agraria tidak hanya sebagai proyek keadilan sosial, tetapi juga sebagai instrumen perjuangan ideologis. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami peran pers sebagai aktor penting dalam mengonstruksi wacana, mengartikulasikan kepentingan politik, serta membentuk opini publik petani pada periode 1950-an sampai 1960-an.

E. Metode Penelitian

Penelitian saya menggunakan metode sejarah untuk menggali dan merekonstruksi reforma agraria tahun 1960 dalam pemberitaan surat kabar suara tani 1956-1963. Untuk merekonstruksi sebuah kisah sejarah, tentu perlu memiliki metode menurut Ajid Thohir dan Sahidin ada 4 metode penelitian sejarah yaitu, Heuristik (pengumpulan sumber), Kritik (pengkajian sumber), Intepertasi (penafsiran sumber), dan historiografi.¹³

1. Heuristik

Pada tahap ini kegiatan diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik secara dokumen maupun lisan. Tahap awal dari pengumpulan sumber ini adalah mengumpulkan sumber sesuai dengan topik yang akan dibahas.¹⁴

Sumber sejarah adalah acuan untuk memberikan penjelasan peristiwa terdahulu sebagai bahan penulisan sejarah berdasarkan bukti-bukti yang relevan dengan penelitian. Untuk meningkatkan keefektifan penggunaan sumber, dilakukan proses identifikasi atau pengklasifikasian sumber ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

¹³ Ajid Thohir dan Sahidin, *Filsafat Sejarah: Profetik, Spekulatif, Dan Kritik*, (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm.80.

¹⁴Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.93.

Dalam tahap ini, penulis melakukan pencarian sumber melalui platform digital seperti Khastara dan Warung Arsip guna memperoleh arsip, dokumen, dan referensi yang relevan guna mendukung analisis. Dari hasil penelusuran tersebut, penulis kemudian memfokuskan pada penggunaan sumber primer sebagai dasar utama dalam penelitian.

a. Sumber Primer

1) Sumber Tertulis

- a) “BTI dan Produksi” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada 01 Agustus 1959
- b) “Daftarkan Semua Tuan Tanah dan Lintah Darat” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada 06 Juni 1958
- c) “Program Tuntutan Kaum Tani” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Agustus 1958
- d) “Hasil-hasil Seminar Agraria” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Januari 1959
- e) “Hasil Seminar Agraria 2” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Februari 1959
- f) “Kembalikan Kepada UUD 45 Untuk Diperluas Nja Kebebasan Demokratis, Tanah Garapan Dan Nasib Bagi Kaum Tani” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Maret/April 1959
- g) “Pembagian Hasil Panen: 6:4 Adalah Adil” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Mei/Juni
- h) “Hasil Seminar Agraria 3” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan September 1959
- i) “Perluas Aksi-aksi 6:4” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan November 1959
- j) “Kibarkan Pandji 6:4 Dan Laksanakan U.U Perdjanjian Bagi Hasil” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Desember 1959
- k) “Kaum Tani Sudah Lama Menghendaki” pada Surat kabar *Suara Tani* yang rilis pada bulan Oktober 1960

- l) “RUU Pokok Agraria & Lepaskan Petani dari Feodalisme” pada Surat kabar *Bintang Timur* yang rilis pada tanggal 5 November 1959
- m) “RUU Perjanjian Bagi Hasil” pada Surat kabar *Bintang Timur* yang rilis pada tanggal 6 November 1959
- n) “Laksanakan Landform Dengan Semestinja Perhebat Ibadah, Perhebat Massa-Aksi” pada Surat kabar *Duta Masyarakat* yang rilis pada tanggal 15 Januari 1965
- o) “Tani: Tudjuan dari pada Revolusi” pada Surat kabar *Minggu Pagi* yang rilis pada tanggal 18 Juli 1965
- p) “Beberapa Ketentuan U.U Pokok Agraria” pada Surat kabar *Merdeka* yang rilis pada 31 Oktober 1960

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan kesaksian dari orang yang bukan merupakan saksi mata atau orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan.¹⁵ Ada beberapa yang menjadi sumber sekunder pada penelitian ini, antara lain:

a) Buku

1. Bernstein, H. *Dinamika kelas dalam perubahan agraria*. Jakarta: Sajogyo Institute, 2020
2. Shohibuddin, Mohamad, and Ahmad Nashih Luthfi. *Land Reform Lokal Ala Ngandagan*. Yogyakarta: STPN Press, 2010.
3. Wiradi, G. *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agraria*. Bandung: Akatiga, 2009.
4. Wiradi, G. *Reforma agraria: Perjalanan yang belum berakhir*. Yogyakarta: Insist Press, 2003.
5. Salim, M. N. *Reforma agraria: Buku ajar STPN*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020.

¹⁵ Sulasman, *ibid.*, hlm.96.

6. Fauzi, Noer. *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: INSIST Press, 1999.

b) Artikel

1. Wibowo, E. Y. "Pertarungan ideologi petani: Studi historis konflik antara Sarekat Tani Islam Indonesia dan Barisan Tani Indonesia (1945–1960)". *Jurnal Historia*, 10(2), 145–162. (2019)
2. Alfarius, Willy. "Barisan Tani Indonesia (BTI) Pada Masa Revolusi Indonesia, 1945-1950" 19, no. 1 (2023).

2. Kritik

Tahap ini merupakan tahap lanjutan, dimana setelah sumber terkumpul pada tahap heuristik yang berupa sumber yang relevan dan terkait pada penelitian. Selanjutnya diseleksi dengan mengacu pada prosedur yang ada, yakni sumber yang faktual dan orisinalnya terjamin, tahap ini disebut dengan kritik.¹⁶

Terdapat dua kritik sumber dalam penelitian sejarah ini, yaitu kritik eksternal dan kritik internal guna mengetahui autentisitas dan kredibilitas dari sumber yang diperoleh. Pada tahapan ini penulis berusaha untuk mengkritik sumber yang telah dihimpun.¹⁷

1) Kritik Ekstern

Kritik ekstern merupakan tahap penilaian sumber yang berfokus pada pemeriksaan keaslian dan keabsahan sumber melalui unsur-unsur luarnya. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi fisik sumber, terutama pada sumber tertulis, dengan memperhatikan ciri-ciri seperti bahan penulisan, bentuk huruf, penggunaan bahasa, serta tampilan dokumen secara keseluruhan. Melalui pemeriksaan tersebut, kritik ekstern bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok apakah sumber tersebut dikehendaki layak atau tidak?, apakah sumber itu asli atau turunan?, apakah sumber itu utuh atau telah berubah?.¹⁸

¹⁶ Sulasman, *ibid.*, hlm.101.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah, Jurnal Ilmu Sejarah Dan Kebudayaan*, (Tiara Wacana, 2013), hlm.77.

¹⁸ Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm.62-67.

Berdasarkan tahapan tersebut, penulis selanjutnya melakukan penilaian terhadap sumber-sumber yang digunakan melalui kritik ekstern.

a. Surat Kabar Suara Tani, 22 Juli 1958.

Surat kabar Suara Tani merupakan salah satu media cetak yang terbit dari zaman kemerdekaan dan dikenal sebagai sarana penyampaian aspirasi kelompok tani serta organisasi yang bergerak di bidang agraria. Dalam penelitian ini, edisi Suara Tani tanggal 22 Juli 1958 digunakan sebagai representasi sumber tertulis untuk dilakukan verifikasi melalui tahapan kritik ekstern.

Dari segi keaslian, arsip surat kabar ini dapat dipertanggungjawabkan karena diperoleh dari repositori digital Khastara yang dikelola oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga resmi penyimpanan arsip nasional. Pemeriksaan terhadap aspek luar sumber menunjukkan ciri-ciri fisik khas surat kabar akhir dekade 1950-an, seperti tata letak kolom yang sederhana, penggunaan tipografi judul berukuran besar, serta gaya bahasa pers yang bersifat persuasif dan politis. Meskipun diakses dalam bentuk digital, hasil pemindaian masih menampilkan karakter usia dokumen, antara lain warna kertas yang menguning dan beberapa bagian teks yang mulai memudar, yang mengindikasikan keaslian arsip cetakan aslinya.

Secara kronologis, edisi ini terbit sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, sehingga memiliki kedekatan temporal dengan dinamika awal perdebatan agraria nasional. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspek keaslian, keutuhan, dan konteks penerbitannya, surat kabar Suara Tani edisi 22 Juli 1958 dinilai layak, memiliki integritas sumber, dan absah untuk digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini.

2) Kritik Internal

Kritik intern merupakan tahapan yang dilakukan untuk menilai kebenaran dan kredibilitas sumber sejarah dengan memusatkan perhatian pada isi atau kesaksian yang terkandung di dalam sumber tersebut. Dalam tahapan ini, ada beberapa langkah yang dilalui oleh penulis untuk melakukan penilaian secara intrinsik yakni dengan menyoroti pengarang sumber (kemampuan saksi dalam

memberikan kesaksian dan kemampuan menyampaikan kebenaran), penulis melakukan perbandingan terhadap sumber dan menilai apakah sumber yang dikritik saling mendukung antar sumber.¹⁹ Berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesaksian atau sumber itu, untuk menilai apakah dapat diandalkan (reliable) atau tidak.

a. Surat Kabar Suara Tani, 18 Juli 1958.

Sebagai representasi sumber tertulis, surat kabar Suara Tani edisi 22 Juli 1958 dianalisis melalui tahapan kritik intern dengan menitikberatkan pada isi pemberitaan dan kesaksian yang disampaikan. Dalam edisi ini membahas keterkaitan antara perjuangan agraria yang dipimpin oleh Barisan Tani Indonesia (BTI) dengan upaya peningkatan produksi bahan makanan nasional pada akhir dekade 1950-an. Narasi yang disajikan menekankan isu penurunan sewatanah, kenaikan upah buruh tani, serta pembagian tanah kepada petani sebagai prasyarat utama peningkatan produksi pertanian.

Dari segi isi dan pengolahan redaksi, bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan ideologis, dengan kecenderungan menampilkan BTI sebagai aktor utama dan paling berjasa dalam perjuangan agraria. Pemberitaan disusun secara sepihak tanpa menghadirkan sudut pandang alternatif atau kritik terhadap kebijakan dan praktik organisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa surat kabar Suara Tani tidak sepenuhnya berfungsi sebagai media jurnalistik netral, melainkan sebagai alat artikulasi politik kelompok tertentu.

Namun demikian, jika ditinjau dari konteks historisnya, isi pemberitaan ini mencerminkan secara jujur pandangan dan kepentingan politik organisasi tani berhaluan kiri. Konsistensi narasi dengan garis ideologi Suara Tani serta kesesuaiannya dengan situasi politik menjelang lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menunjukkan bahwa sumber ini sah dalam merepresentasikan wacana agraria dari sudut pandang internal gerakan tani. Dengan demikian, meskipun bersifat subjektif dan ideologis, surat kabar Suara Tani edisi 22 Juli 1958 tetap kredibel dan dapat diandalkan sebagai sumber yang

¹⁹ Priyadi, *ibid.*, hlm 67-70.

jasas untuk memahami konstruksi wacana agraria pada periode tersebut, selama digunakan secara kritis.

3. Interpretasi

Tahapan berikutnya dalam metode penelitian sejarah adalah interpretasi atau penafsiran. Tahap ini dilakukan setelah heuristik dan kritik sumber (eksternal maupun internal), sehingga sumber yang digunakan telah teruji keautentikan dan kredibilitasnya. Pada tahap ini, peneliti tidak lagi mengumpulkan data, melainkan menafsirkan makna dari fakta-fakta sejarah yang diperoleh. Sebagai disiplin ilmiah, sejarah menuntut penalaran rasional dan argumentasi yang berpijak pada fakta empiris. Oleh karena itu, interpretasi harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati agar tidak menyimpang dari data. Kebenaran dalam sejarah ditentukan oleh kesesuaian antara penafsiran dengan fakta serta konteks zamannya, bukan oleh subjektivitas peneliti.²⁰

Dalam praktiknya, interpretasi mencakup dua proses utama, yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan dengan menguraikan fakta ke dalam unsur-unsur seperti tema, aktor, dan kecenderungan narasi, sedangkan sintesis menyatukan unsur-unsur tersebut menjadi penjelasan yang utuh, koheren, dan logis. Melalui proses ini, sejarawan merekonstruksi peristiwa masa lalu secara rasional dengan tetap berpijak pada data historis yang tersedia.

Berangkat dari kerangka tersebut, tahap interpretasi dalam penelitian ini diarahkan untuk menafsirkan fakta-fakta sejarah yang bersumber dari surat kabar Suara Tani periode 1956–1963. Interpretasi tidak hanya difokuskan pada isi pemberitaan secara tekstual, tetapi juga pada pemahaman terhadap konteks sosial-politik yang melatarbelakangi produksi teks, termasuk posisi Suara Tani sebagai media yang memiliki keterkaitan ideologis dengan gerakan dan kepentingan petani. Dengan demikian, surat kabar ini dipahami tidak semata-mata sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai aktor historis yang turut berperan dalam pembentukan wacana reforma agraria.

²⁰ Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm.78-80.

Berdasarkan pembacaan terhadap sumber, fakta-fakta yang diperoleh menunjukkan konsistensi pemberitaan mengenai ketimpangan penguasaan tanah, representasi petani sebagai kelompok yang tertindas secara struktural, serta penekanan pada urgensi pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Fakta-fakta tersebut saling berkaitan dan membentuk pola wacana yang menempatkan reforma agraria sebagai persoalan keadilan sosial dan politik, bukan sekadar masalah teknis-administratif. Untuk memahami pola tersebut, interpretasi dalam penelitian ini dilakukan secara teoretis dengan menggunakan analisis framing.

Dalam perspektif Robert N. Entman, framing dipahami melalui empat unsur utama, yaitu define problems (pendefinisian masalah), diagnose causes (penyebab masalah), make moral judgement (penilaian moral), dan treatment recommendation (rekomendasi penyelesaian). Melalui kerangka ini, media dipahami tidak sekadar merepresentasikan realitas, tetapi juga mengorganisasi dan membentuk makna atas suatu peristiwa.²¹

Berdasarkan analisis terhadap teks pemberitaan Suara Tani, unsur define problems terlihat dari cara surat kabar ini membingkai reforma agraria sebagai persoalan ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah. Unsur diagnose causes tampak pada penjelasan bahwa ketimpangan tersebut berakar pada warisan struktur agraria kolonial dan ketidakadilan distribusi tanah. Selanjutnya, unsur make moral judgement tercermin dalam representasi petani sebagai kelompok yang tertindas, sehingga memperkuat legitimasi moral terhadap tuntutan perubahan. Adapun unsur treatment recommendation diwujudkan melalui penekanan pada pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 sebagai solusi terhadap ketimpangan tersebut.

Melalui keempat unsur tersebut, terlihat bahwa framing yang dibangun Suara Tani menempatkan reforma agraria sebagai bagian dari perjuangan sosial-politik rakyat tani. Media ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengarahkan pembaca untuk memahami konflik agraria sebagai konsekuensi dari

²¹ Robert M. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm," *Journal of Communication* 43, no. 4 (1993): hlm.52, <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>.

struktur sosial yang timpang. Namun demikian, interpretasi ini juga mempertimbangkan bahwa framing tersebut berpotensi berfungsi sebagai strategi mobilisasi politik dalam konteks persaingan ideologis pada periode 1950-an sampai 1960-an.

Dengan demikian, interpretasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa framing isu reforma agraria dalam Suara Tani mencerminkan posisi ideologis surat kabar tersebut. Framing tersebut berperan dalam mengartikulasikan kepentingan petani serta membangun reforma agraria sebagai agenda struktural dan politis dalam dinamika sosial-politik Indonesia akhir 1950-an hingga awal 1960-an. Interpretasi ini tetap dibatasi oleh lingkup sumber yang digunakan, sehingga tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan keseluruhan wacana reforma agraria, melainkan untuk memahami konstruksi isu tersebut dalam satu medium pers tertentu.

4. Historiografi

Keempat, tahap historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan proses penyusunan dan pemaparan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan secara sistematis. Pada tahap ini, penulisan diharapkan mampu menggambarkan secara jelas keseluruhan proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga penarikan kesimpulan. Melalui penulisan ini pula dapat dinilai apakah penelitian yang dilakukan telah mengikuti prosedur metode sejarah dengan baik, serta apakah sumber-sumber yang digunakan memiliki tingkat keaslian (otentisitas) dan dapat dipercaya (kredibilitas). Dengan demikian, kualitas penelitian sejarah yang dihasilkan dapat terlihat secara menyeluruh.²²

Topik dalam penulisan ini berjudul *“Rerofma Agararia Tahun 1960 dalam Pemberitaan Surat Kabar Suara Tani (1956-1963).”*. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, membahas kerangka awal penelitian yang meliputi pemaparan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang digunakan.

²² Dina Marlina, *Metode Sejarah Lisan*, (Bandung: Humaniora, 2023), hlm.5-6.

BAB II, membahas kebijakan reforma agraria hingga lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, yang mencakup latar belakang persoalan agraria dan ketimpangan penguasaan tanah, proses perumusan UUPA 1960, isi pokok kebijakan reforma agraria, serta reaksi politik dan wacana nasional mengenai reforma agraria.

BAB III, membahas pemberitaan reforma agraria dalam surat kabar Suara Tani periode 1956-1963, yang mencakup sejarah pendirian dan karakter ideologis Suara Tani, pemberitaan reforma agraria sebelum UUPA 1960, pemberitaan pada tahun 1960, serta pemberitaan pasca-1960. Bab ini juga menyoroti konstruksi dan framing reforma agraria yang dibangun oleh Suara Tani.

BAB IV, merupakan bagian akhir yang memuat simpulan penelitian sebagai hasil analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dengan demikian, keempat bab dalam penelitian ini disusun secara berkesinambungan, dimulai dari landasan teoritis dan historis hingga tahap analisis dan penarikan kesimpulan, yang secara keseluruhan bertujuan merekonstruksi serta menganalisis reformasi agraria dalam pemberitaan surat kabar *Suara Tani* periode 1956-1963.